

PEMBERIAN PROGRAM SPECIAL IMMIGRANT VISA AMERIKA SERIKAT BAGI WARGA NEGARA AFGHANISTAN TAHUN 2009-2014

Desak Ketut Indraswari¹⁾, D.A Wiwik Dharmiasih²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: desakindraswari@gmail.com¹, wiwikd@gmail.com²,

aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

9/11 brought a considerable impact on international security, especially for United States. Post 9/11, US declared Global War on Terrorism and war in Afghanistan to arrest the perpetrators of 9/11. US also made changes in their immigration policy. This research analyzes the purpose of US in providing Special Immigrant Visas (SIV) program for citizens of Afghanistan in 2009-2014. SIV program is certainly contradictory with US's policy post 9/11. This issues discussed by answering the question to why the US provide SIV for citizens of Afghanistan. Data for this study were collected from various sources including: literary sources, news and reports, then analyzed with national interest, national strategic and foreign policy theoretical frameworks. The analysis shows that US provide SIV program to recruit citizens of Afghanistan in achieving the US's goals on Afghanistan war. SIV program serves as an attraction and appreciation of Afghan citizens who have helped US in Afghan war.

Keywords: Terrorism, Special Immigrant Visa, National Interest, National Strategy, Foreign Policy

1. PENDAHULUAN

Isu keamanan merupakan salah satu isu yang paling penting bagi suatu negara karena menjadi sumber penentu utama keberadaan serta pengaruh negara di arena internasional (William, 2008). Isu keamanan yang dihadapi oleh negara saat ini tidak lagi terbatas pada masalah perang, namun permasalahan saat ini telah menjadi lebih beragam. Salah satu contohnya adalah permasalahan terorisme (Buzan, 1991). Isu terorisme menjadi suatu

isu dunia pasca Tragedi 9/11. Pasca peristiwa tersebut, Amerika Serikat mendeklarasikan *Global War on Terror* dan mengajak seluruh negara di dunia untuk memerangi masalah terorisme.

Green (2015) menyebutkan bahwa pasca Tragedi 9/11, Pemerintah Amerika Serikat memperketat aturan imigrasi ke wilayahnya. Pemerintah Amerika Serikat bahkan membentuk *Department of Homeland Security* yang bertugas untuk mengawasi, membatasi serta mengeliminasi penduduk asing yang

dicurigai memiliki potensi untuk membahayakan Amerika Serikat. Holmes (2015) menambahkan bahwa *Department of Homeland Security* juga bertugas untuk memperkuat pertahanan nasional dari ancaman teroris ataupun serangan lain yang berasal dari dalam maupun luar Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan pengawasan yang sangat ketat bagi setiap individu yang ingin memasuki wilayah Amerika Serikat, terlebih bagi individu-individu yang berasal dari negara-negara yang dicurigai sebagai basis kelompok-kelompok teroris (Bali, 2008: 471). Salah satu negara yang dinyatakan sebagai tempat berkembangnya kelompok teroris adalah Afghanistan. Afghanistan merupakan negara tempat Al-Qaeda, organisasi teroris yang bertanggung jawab terhadap Tragedi 9/11, berada (McCabe, 2010). Berbanding terbalik dengan pengetatan imigrasi bagi negara Afghanistan, pada tahun 2006 Amerika Serikat mencetuskan kebijakan *Special Immigrant Visa* (SIV). Program SIV dibuat untuk memberikan kemudahan bagi warga negara Afghanistan untuk mendapatkan visa dan menetap di Amerika Serikat. Penelitian ini menjadi suatu hal yang menarik karena pemberian program SIV bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat yang mengetatkan aturan keimigrasiannya. Apalagi program tersebut ditujukan bagi warga negara Afghanistan yang dinilai rentan terhadap kasus terorisme dan dinyatakan sebagai tempat berkembangnya kelompok Al-Qaeda, salah satu musuh terbesar Pemerintah Amerika Serikat (McCabe, 2010). Penelitian ini ingin

mengkaji mengapa Amerika Serikat memberikan program *Special Immigrant Visa* bagi warga negara Afghanistan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemberian *Special Immigrant Visa* bagi warga negara Afghanistan oleh Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan dua kajian pustakan yaitu: *A Dirty War in West Africa: The RUF and the Destruction of Sierra Leone* (2005) karya Lansana Gberie dan *The Japanese American Experience* yang diterbitkan oleh *Japanese American Citizens League* (JACL) di tahun 2011. Kajian pustaka pertama yaitu *A Dirty War in West Africa: The RUF and the Destruction of Sierra Leone* (2005) membahas tentang konflik internal yang terjadi di Sierra Leone. Konflik internal tersebut disebabkan oleh suatu kelompok yang disebut dengan RUF. RUF melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan masyarakat lokal untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah.

Guna menghadapi serangan dari RUF dan menjaga stabilitas nasional, pada tahun 1995, pemerintah Sierra Leone memutuskan untuk membayar pasukan militer swasta, *Executive Outcomes*, untuk mengamankan serta mengembalikan stabilitas nasional di negara tersebut. Pasukan militer *Executive Outcomes* mampu meredakan pemberontakan yang dilakukan oleh RUF dengan berhasil mengusir pasukan pemberontak tersebut dari wilayah Sierra Leone (Gberie, 2005). Walaupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sierra Leone berhasil menekan

kelompok pemberontak, namun kebijakan tersebut mendapatkan banyak pandangan negatif dari masyarakat internasional karena tidak memperhitungkan nasib dan keamanan dari warga sipil yang terpaksa menjadi pasukan pemberontak RUF (Gberie, 2005: 15).

Gberie (2005) berargumen kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sierra Leone merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keamanan, kedaulatan dan stabilitas nasional. Argumen Gberie (2005) membantu proses penelitian dalam melihat bahwa pemerintah suatu negara akan mengambil kebijakan untuk menjaga keamanan, kedaulatan dan stabilitas nasional, meskipun kebijakan tersebut menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.

Kajian pustaka kedua dalam penelitian ini berjudul *The Japanese American Experience* yang diterbitkan oleh *Japanese American Citizens League* (JACL) di tahun 2011 mengenai perlakuan Pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang Jepang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mendapatkan tekanan dari warga lokal Amerika Serikat yang memaksa pemerintah untuk mengasingkan serta mencabut hak-hak kewarganegaraan dari orang-orang Jepang tersebut. Namun pemerintah Amerika Serikat justru berhasil memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik. Amerika Serikat yang saat itu tengah terlibat dalam Perang Pasifik menjadikan orang-orang Jepang tersebut sebagai pasukan bantuan bagi militer Amerika Serikat. Sebagai timbal baliknya maka

orang-orang Jepang tersebut akan tetap mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Amerika Serikat. Strategi tersebut terbukti mampu membawa Amerika Serikat dalam memenangkan Perang Pasifik dalam jangka waktu yang lebih singkat. Penelitian ini menggunakan tulisan JACL (2011) sebagai acuan karena menjelaskan tindakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang Jepang berkewarganegaraan Amerika Serikat sebagai bagian dari Strategi Nasional untuk memperkuat serta mencapai kepentingan keamanan Amerika Serikat.

Pada penelitian Lansana Gberie dan Japanese American Citizen League, kedua tulisan tersebut menggunakan beberapa kerangka berpikir yaitu antara lain Stabilitas Nasional, Kebijakan Nasional, Kepentingan Luar Negeri dan Strategi Nasional. Namun, pada penelitian ini hanya menggunakan kerangka berpikir Kepentingan Nasional dan Strategi Nasional, berikutnya tulisan ini juga menambahkan kerangka berpikir Kebijakan Luar Negeri. Berdasarkan kedua tinjauan pustaka diatas, penelitian ini mengkaji bahwa Kepentingan Nasional, Strategi Nasional dan Kebijakan Luar Negeri pemerintah merupakan kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam menjelaskan tujuan dari Pemerintah Amerika Serikat dalam pemberian program SIV bagi warga negara Afghanistan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian

kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran serta menjelaskan fenomena sosial yang tidak dapat diukur atau dihitung. Silalahi (2012) menjelaskan metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan interpretasi dari suatu permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Menurut Silalahi (2012), data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, situs resmi, laporan, buletin serta majalah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data-data yang dipakai dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami serangan terorisme paling besar dalam sejarah berdirinya negara tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan sebutan Tragedi 9/11 merupakan serangkaian aksi teror bunuh diri yang dilakukan dengan menabrakan pesawat-pesawat komersil (VOA, 2005). Terdapat empat pesawat komersil dari *United Airlines* dan *American Airlines* yang digunakan untuk menyerang tempat-tempat penting di Amerika Serikat yaitu Menara Kembar *World Trade Center* di New York dan Gedung Pentagon di Washington D.C. (Dwidjasa, 2015). Kedua tempat tersebut menjadi target aksi terorisme karena Menara Kembar *World Trade Center* merupakan simbol globalisasi

serta kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Sementara, Gedung Pentagon merupakan markas dan simbol kekuatan militer Amerika Serikat. Para pelaku beranggapan dengan melakukan penyerangan terhadap dua tempat tersebut akan mampu memperlemah kekuatan serta menghancurkan citra Amerika Serikat sebagai negara yang kuat dan aman (9/11 Memorial, 2016). Pasca Tragedi 9/11 mulai bermunculan pandangan negatif terhadap masyarakat muslim di seluruh dunia dan di Amerika Serikat khususnya. Pandangan negatif terhadap masyarakat Muslim di Amerika Serikat muncul karena Tragedi 9/11 dilakukan oleh suatu organisasi yang mengatasnamakan Agama Islam yaitu Al-Qaeda.

Peristiwa terorisme pada Tragedi 9/11 memberi dampak yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat. Peristiwa tersebut tidak hanya membawa perubahan pada kebijakan terkait keamanan nasional serta citra Amerika Serikat, namun juga menyebabkan munculnya sejumlah kebijakan baru serta perubahan pada beberapa kebijakan yang berlaku di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Kebijakan *War on Terror* yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush. Kebijakan *War on Terror* merupakan kebijakan yang dideklarasikan oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk perang terhadap terorisme. Kebijakan *War on Terror* kemudian menjadi prioritas utama dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat (U.S Department Of Defense, 2002). Amerika Serikat juga

membentuk sejumlah kebijakan keamanan lainnya sebagai tindak lanjut dari kebijakan *War on Terror*. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pembentukan *Department of Homeland Security*, peningkatan anggaran militer, hingga pembuatan kebijakan imigrasi yang lebih ketat terutama bagi imigran asing yang beragama Islam maupun yang berasal dari negara-negara Islam.

Department of Homeland Security atau DHS merupakan penggabungan dari 22 lembaga negara yang bergerak dalam bidang keamanan (*Department of Homeland Security*, 2016). Tujuan utama dari pembentukan DHS adalah untuk melindungi keamanan masyarakat, negara, serta nilai-nilai Amerika Serikat terhadap serangan-serangan yang mungkin muncul baik dari dalam maupun luar lingkungan negara. Sebagai suatu lembaga pemerintah yang terbentuk pasca Tragedi 9/11, DHS memiliki fokus utama dalam pemberantasan dan pencegahan ancaman terorisme.

Selain membentuk DHS, Amerika Serikat juga menetapkan sejumlah tujuan baru pada bidang militer yaitu melalui *Quadrennial Defense Review Report* (QDRR) yang dikeluarkan tahun 2001. Laporan QDRR berisi empat tujuan utama keamanan di bidang militer Amerika Serikat, yaitu; (1) untuk menjamin keamanan nasional dan sekutu Amerika Serikat; (2) untuk menghindari kompetisi militer di masa yang akan datang; (3) untuk menghancurkan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat; dan (4) jika upaya pencegahan

gagal, maka Amerika Serikat akan mengambil langkah lanjutan untuk melawan musuh-musuhnya dalam bidang militer. Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, Amerika Serikat melakukan penambahan anggaran militer serta membuat *Six Step Strategy* yang dikeluarkan oleh Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika Serikat periode 2001-2006 (Triwahyuni, 2010). *Six Step Strategy* berisi tentang tujuan dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh Amerika Serikat dalam kebijakan keamanan Amerika Serikat pasca Tragedi 9/11. Keenam tujuan tersebut antara lain: (1) melindungi keamanan negara dan menjaga pangkalan-pangkalan AS di luar negeri; (2) membangun dan mempertahankan kekuatan dalam medan-medan perang; (3) meniadakan tempat perlindungan bagi musuh dan memastikan bahwa tidak satu pun tempat di dunia ini yang dapat melindungi musuh dari penangkapan; (4) melindungi jaringan informasi dari serangan-serangan, (5) mempergunakan teknologi informasi untuk hubungan antar berbagai kekuatan militer sehingga dapat bekerja sama dalam berperang, dan (6) mempertahankan kemudahan akses udara dan melindungi kemampuan (pertahanan) udara dari serangan musuh.

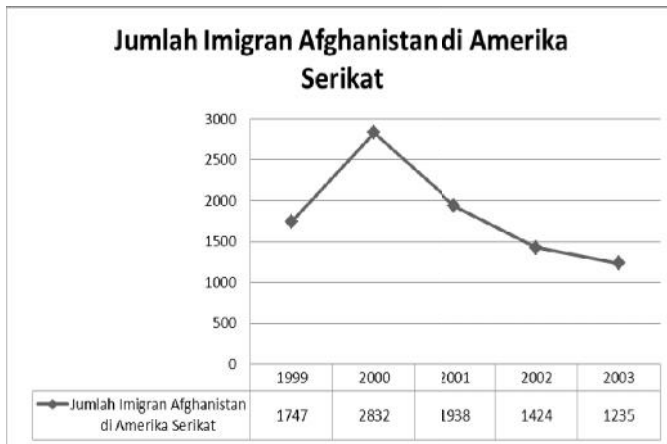
Pemerintah Amerika Serikat juga membuat sejumlah kebijakan baru di bidang imigrasi salah satunya adalah penerapan *Technology of Exclusion* (ToE). ToE merupakan serangkaian kebijakan-kebijakan atau upaya sistematis untuk menyingkirkan atau menyisihkan kelompok-kelompok imigran yang berasal dari

negara-negara yang dicurigai sebagai basis teroris seperti Afghanistan dan Irak (Marthinus, 2009). Selain melakukan ToE, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan UNHCR. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat karena sebagian besar imigran yang ingin memasuki wilayah Amerika Serikat merupakan para pengungsi yang berasal dari wilayah rawan konflik seperti Afghanistan. Perubahan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat juga membawa pengaruh bagi imigran yang telah berada dan menetap di Amerika Serikat (Poladian, 2015). Salah satunya adalah dengan diterapkannya kebijakan *USA Patriot Act 2001*. *USA Patriot Act 2001* merupakan kebijakan yang dibuat untuk memperkuat keamanan nasional dengan cara memerangi terorisme dan juga mengatur tentang masalah keimigrasian dan masalah perbatasan (Diamond, 2015). Banyak yang menilai kebijakan tersebut kontroversial karena memberi kewenangan bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk mengakses informasi-informasi pribadi seluruh individu yang berada dan mengajukan diri untuk tinggal di Amerika Serikat (Jenks, 2001), seperti menyadap telepon, *email*, catatan kesehatan dan keuangan, hingga catatan peminjaman buku di perpustakaan (Dinh, 2004). Informasi-informasi yang diperoleh dapat ditindaklanjuti lebih jauh dengan melakukan pengawasan lebih lanjut, menutup rekening keuangan, memberi hukuman penjara, bahkan melakukan deportasi terhadap imigran yang bersangkutan (Whitehead & Aden, 2002) bila ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Pemerintah Amerika Serikat

tidak segan mendeportasi imigran yang diduga memiliki kaitan dengan aksi terorisme beserta orang-orang yang memiliki kaitan dan hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan (Gerstle, 2004).

Berbagai kebijakan tersebut juga berimbas pada turunnya angka imigran asal Afghanistan di Amerika Serikat. Jumlah warga negara Afghanistan yang ingin keluar dari negaranya dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan keamanan di Afghanistan sehingga kegiatan ekonomi juga turut hancur. Kemudian warga negara Afghanistan memandang Amerika Serikat sebagai negara maju dengan peluang lapangan pekerjaan serta keamanan yang lebih baik. Sehingga masyarakat Afghanistan banyak yang ingin bermigrasi ke Amerika Serikat. Sebagaimana terlihat dalam Grafik jumlah imigran asal Afghanistan di Amerika Serikat mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 1999 ke tahun 2000. Namun karena adanya Tragedi 9/11 pada tahun 2001, jumlah imigran asal Afghanistan di Amerika Serikat menurun dengan drastis. Penurunan tersebut terus terjadi pada tahun 2002 dan diikuti di tahun 2003. Penurunan terhadap jumlah imigran Amerika Serikat di Afghanistan juga tidak dapat dilepaskan dari adanya pengetatan aturan imigrasi serta pelaksanaan dari *Technology of Exclusion* maupun kebijakan *USA Patriot Act 2001*.

Jumlah Imigran Afghanistan di Amerika Serikat Tahun 1999-2003



Sumber : Yearbook of Immigration Statistic (2008)

Penurunan jumlah warga negara Afghanistan yang diterima di Amerika Serikat pasca Tragedi 9/11 dapat dilihat sebagai bentuk kewaspadaan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan negaranya dari orang-orang yang dicurigai mampu memberikan ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat. Afghanistan dalam hal ini menjadi salah satu negara yang paling diwaspadai oleh Amerika Serikat mengingat bahwa pelaku dari Tragedi 9/11 berbasis di Afghanistan. Alasan tersebut juga menjadi latar belakang dibalik ketatnya pengawasan terhadap warga negara Afghanistan yang ingin memasuki Amerika Serikat dan penurunan jumlah warga negara Afghanistan yang diterima di Amerika Serikat.

Tidak hanya membuat sejumlah kebijakan untuk memperkuat keamanan nasional, pasca Tragedi 9/11 pemerintah Amerika Serikat melakukan penyerangan ke Afghanistan sebagai upaya untuk menangkap Osama Bin Laden yang

merupakan pemimpin Al-Qaeda. Namun serangan Amerika Serikat tersebut mendapat perlawanan dari Kelompok Taliban di Afghanistan. Kelompok Taliban merupakan kelompok yang sudah menguasai Afghanistan sejak tahun 1996. Sebelum memutuskan untuk mengibarkan perang dengan Kelompok Taliban, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 melalui Presiden Bush telah menghimbau Kelompok Taliban agar menangkap pasukan Al-Qaeda beserta pemimpinnya dan menyerahkan mereka kepada Amerika Serikat (Bruno, 2013). Namun himbauan tersebut tidak diindahkan oleh Kelompok Taliban sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan serangan langsung ke Afghanistan.

Serangan pertama pasukan Amerika Serikat terjadi pada tanggal 7 Oktober 2001 dan didukung oleh pasukan militer Inggris, Perancis, Kanada, Australia dan Jerman. Serangan tersebut kemudian dikenal dengan *Operation Enduring Program*. Setelah beberapa tahun menjalankan *Operation Enduring Program*, Amerika Serikat ternyata belum mampu mencapai tujuan utamanya yaitu untuk menangkap Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama Bin Laden. Hal ini terjadi karena kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh Amerika Serikat pada *Operation Enduring Program* yaitu: (1) Kondisi alam Afghanistan, (2) Keadaan masyarakat Afghanistan yang sangat tertutup dan memegang teguh agama serta budaya, (3) Penggunaan bahasa daerah oleh hampir seluruh penduduk Afghanistan dan (4) Kecaman publik atas tindakan yang

dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan (Roshtein & Arquilla, 2012).

Sebagai tindakan Amerika Serikat dalam mengatasi berbagai kendala yang ada, Amerika Serikat kemudian membentuk suatu strategi yang dapat dijadikan sebagai solusi dari tiap permasalahan yang ada. Strategi yang dipilih oleh Amerika Serikat adalah melalui rekrutmen warga lokal Afghanistan untuk membantu pasukan Amerika Serikat. Proses rekrutmen terhadap warga lokal bukanlah suatu hal yang mudah karena karakteristik masyarakat yang sangat tertutup. Untuk itu Amerika Serikat melakukan proses rekrutmen dengan cara melakukan pendekatan terhadap kelompok oposisi dari Al-Qaeda dan Taliban yaitu *Northern Alliance*. Sebagai timbal balik atas kerjasama dari kelompok *Northern Alliance*, maka Amerika Serikat akan memberikan bantuan dana operasional dan bantuan pelatihan bela diri bagi anggota kelompok *Northern Alliance* (Jalalzai, 2015). Strategi kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan merekrut kaum muda Afghanistan. Kaum muda Afghanistan umumnya adalah orang-orang yang memiliki pemikiran lebih terbuka serta tidak terlalu fanatik terhadap imam. Menurut data dari *Yearbook of Immigration Statistic* tahun 2013, mayoritas warga negara Afghanistan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat merupakan orang-orang dengan rentang usia antara 22 hingga 35 tahun. Ketersediaan kaum muda Afghanistan membantu pasukan Amerika Serikat dipengaruhi oleh reputasi buruk Kelompok Taliban selama memimpin pemerintahan di Afghanistan.

Kedua strategi Amerika Serikat dalam upaya merekrut warga negara Afghanistan diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan *Special Immigrant Visa* (SIV) melalui *Afghan Allies Protection Act of 2009*. Kebijakan SIV yang dicetuskan tahun 2006 dan diumumkan secara resmi pada tahun 2008 (Lonsdorf dan Martin, 2016) merupakan kebijakan yang diambil setelah Pemerintah Amerika Serikat melihat respon warga negara Afghanistan yang antusias menyambut kebijakan tersebut. Kebijakan SIV merupakan kebijakan pemberian visa khusus bagi warga negara Afghanistan yang bekerja sama dengan pasukan Amerika Serikat dalam misi memerangi terorisme di Afghanistan (U.S Department of State-Bureau Consular Affairs, 2010). Berdasarkan *U.S. Citizenship and Immigration Services* (2011), SIV merupakan suatu program pemberian visa khusus bagi warga negara Afghanistan yang telah berkontribusi pada upaya pemberantasan terorisme serta penegakan perdamaian di wilayah Afghanistan. Meskipun banyak pihak yang awalnya mengira bahwa kebijakan SIV merupakan suatu kebijakan yang murni kebijakan dalam bidang imigrasi, namun pada kenyataannya kebijakan SIV merupakan suatu strategi Amerika Serikat untuk mencapai keamanan nasional serta memperkuat posisi Amerika Serikat pada *Operation Enduring Program*. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan Betsy Fisher (2016), yang menyatakan bahwa :

“*This isn’t an immigration program, it’s a program of national security.*”

Kebijakan SIV juga terbukti mampu menjadi daya tarik bagi warga negara Afghanistan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari *Institute for Study of War* (2009), yaitu:

Jumlah Warga Negara Afghanistan yang Bergabung dengan Amerika Serikat pada Perang Afghanistan

Tahun	Jumlah Warga Negara Afghanistan yang Bergabung dengan Amerika Serikat
2006	36.000
2007	153.177
2008	135.000
2009	80.000
2010	95.700
2011	96.200
2012	97.220

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah warga negara Afghanistan yang bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 2007. Hal ini terjadi seiring dengan dicetuskannya kebijakan SIV pada tahun 2006. Pemerintah Amerika Serikat melakukan rekrutmen besar-besaran terhadap warga lokal dikarenakan warga lokal tersebut nantinya

akan ditempatkan pada posisi-posisi berbeda sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Sebagian besar dari warga lokal tersebut akan ditempatkan sebagai penerjemah, ahli budaya serta wilayah geografis, mata-mata di kelompok Taliban maupun Al-Qaeda serta pasukan militer atau tentara bantuan.

Warga negara Afghanistan yang telah bekerja selama sekurangnya dua tahun untuk Amerika Serikat memiliki hak untuk mengajukan SIV. Pengajuan SIV tidak hanya berlaku bagi individu yang membantu pasukan Amerika Serikat, namun juga berlaku bagi keluarga mereka. Kebijakan SIV juga mengakomodasi warga negara Afghanistan untuk mendapatkan *green card* atau status *permanent resident* di Amerika Serikat. Imigran asal Afghanistan yang mendapat *green card* atau status *permanent resident* dapat hidup secara permanen dan mendapatkan pekerjaan secara legal di Amerika Serikat (Nieman, 2015).

Kebijakan SIV telah mampu menarik minat warga negara Afghanistan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam Perang Afghanistan. Kerja sama antara warga negara Afghanistan dan Amerika Serikat membawa sejumlah perubahan terkait dengan posisi Amerika Serikat pada Perang Afghanistan. Pasca bergabungnya warga negara Afghanistan menjadi pasukan Amerika Serikat, Amerika Serikat telah mampu mengurangi kekuatan dan perlawanan dari Kelompok Taliban yang tidak setuju atas upaya Amerika Serikat dalam memerangi jaringan

terorisme Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama Bin Laden. Amerika Serikat merasa perlu untuk mengambil alih kekuasaan Kelompok Taliban di Afghanistan karena Kelompok Taliban merupakan aliansi dari jaringan terorisme Al-Qaeda serta untuk memastikan tidak ada lagi pengaruh terorisme di wilayah Afghanistan. Selain itu salah satu keberhasilan terbesar Amerika Serikat pasca berlakunya SIV adalah Amerika Serikat berhasil mencapai misi utama dalam *Operation Enduring Program* yaitu menangkap Osama Bin Laden. Osama Bin Laden tertangkap di Pakistan pada tanggal 1 Mei 2011 karena adanya bantuan dari warga lokal Afghanistan yang menyamar sebagai mata-mata di kelompok Al-Qaeda.

5. KESIMPULAN

Pasca tragedi 9/11, Amerika Serikat membuat kebijakan *War on Terrorism* dan mengajak seluruh negara di dunia untuk melakukan perang melawan terorisme. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memerangi terorisme adalah dengan melakukan serangan ke Afghanistan yang diketahui sebagai basis dari kelompok Al-Qaeda yang juga merupakan pelaku dari tragedi 9/11. Seperti yang dijabarkan pada bab sebelumnya, untuk memaksimalkan perlawanan terhadap jaringan terorisme kelompok Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama Bin Laden, Amerika Serikat merekrut penduduk lokal untuk bekerja sama. Sebagai timbal baliknya, warga negara Afghanistan dapat mengajukan visa

husus kepada Amerika Serikat melalui program *Special Immigrant Visa* (SIV).

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini adalah suatu negara akan membentuk kebijakan luar negeri berdasarkan strategi nasional negara tersebut untuk mencapai kepentingan keamanannya. Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan suatu bentuk strategi nasional dengan mengeluarkan kebijakan *Special Immigrant Visa* (SIV). Penggunaan strategi nasional melalui kebijakan *Special Immigrant Visa* (SIV) dilihat lebih efektif dan efisien dalam membantu Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini juga telah dipaparkan pada bab IV, ketika Amerika Serikat mulai melakukan strategi dengan cara menyusupkan sejumlah mata-mata yang merupakan warga negara Afghanistan ke dalam pasukan Al-Qaeda dan Kelompok Taliban. Langkah tersebut lebih efektif karena Amerika Serikat dapat melakukan upaya pencegahan terhadap aksi yang direncanakan oleh Al-Qaeda dan Taliban. Pelaksanaan kebijakan SIV merupakan suatu strategi nasional yang berhasil membawa Amerika Serikat dalam mencapai misi utamanya yaitu memberantas jaringan terorisme Al-Qaeda dan menangkap Osama Bin Laden sebagai pemimpin utama Al-Qaeda.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bali, S. (2008). Population Movement. Dalam P. D. Williams, *Security*

- Studies: An Introduction* (hal. 469). London: Routledge.
- Bruno, G. (2013, June). *U.S. War in Afghanistan*. Dipetik January 14, 2017, dari Council on Foreign Relations: <http://www.cfr.org>
- Buzan, B. (1991). *People, States & Fear*. United Kingdom: ECPR Publisher.
- Diamond, J. (2015, May 23). *Everything You Need To Know About the Patriot Act*. Dipetik August 4, 2016, dari CNN Politics: <http://www.edition.cnn.com>
- Dinh, V. D. (2004). *USA Patriot Act*. Hein Online.
- Dwidayasa, J. (2015, September 11). *11 September 2001, Tragedi 9/11 Gemparkan AS*. Dipetik August 1, 2016, dari Okezone.com: <http://m.okezone.com>
- Gberie, L. (2005). *A Dirty War in West Africa: The RUF and the Destruction of Sierra Leone*. Bloomington, USA: Indiana University Press.
- Green, M. (2015, September 10). *How 9/11 Changed America: Four Major Lasting Impacts*. Retrieved June 12, 2016, from U.S Foreign Poicy: <http://www.kqed.org>
- Gerstle, G. (2004). The Immigrant as Threat to American Security: A Historical Perspective. Dalam J. Tirman, *The Maze Of Fear* : *Security and Migration after 9/11* (hal. 87-88). New York: The New York Press.
- International Refugee Assistance Project. (2016, July 8). *IRAP in U.S News and World Report: Thousands of Afghan Interpreters Wait for Visas as Congress Squabbles*. Dipetik March 2, 2017, dari Urban Justice Center: International Refugee Assistance Project: <https://www.refugeerights.org>
- Institute For The Study Of War. (2009). *Afghanistan International Army* . Dipetik March 9, 2017, dari Institute For The Study Of War: <http://www.understandingwar.org>
- Japanese American Citizens League. (2011). *A Lesson in American History : The Japanese American Experience*,. Curriculum and Resource Guide 5th Edition.
- Jenks, R. (2001, December). *The USA Patriot Act 2001: A Summary of the Anti-Terrorism Law's Immigration-Related Provision*. Dipetik August 4, 2016, dari Center for Immigration Studies: <http://www.cis.org>
- Kim R. Holmes, P. (2015). *What Is National Security?* Retrieved June 12, 2016, from U.S. Military Strength: index.heritage.org
- Marthinus, P. (2009). *Aktivisme Pengungsi Irak di Amerika Serikat*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- McCabe, M. J. (2002). *New Issues in Refugee Research*. California: Center For Documentation and Research.
- Office of Immigration Statistics. (2009). *Yearbook of Immigration Statistics: 2008*. USA: Departement Of Homeland Security United States.
- Poladian, C. (2015, September 09). *The United States After 9/11: 6 Things That Have Changed Since 2001*. Dipetik August 3, 2016, dari IBT: <http://www.ibtimes.com>
- Rothstein, H., & Arquilla, J. (2012). *Afghan Endgames: Strategy and Policy Choices for America's Longest War*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Triwahyuni, D. (2010). *Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- United States Bureau of Citizenship and Immigration Services. (1999, December 14). *Afghanistan: Background on the Anti-Taliban Group, the Northern Alliance*. Dipetik October 6, 2016, dari REF: <http://www.refworld.org>
- U.S Department of Defense. (2002). *National Security Strategy 2015*. Washington D.C.
- Whitehead, J. W., & Aden, S. (2002). *Forfeiting "Enduring Freedom" for "Homeland Security" : A Constitutional Analysis of The USA Patriot Act and The Justice Departments Anti-Terrorism Initiatives*. HeinOnline.
- William, P. D. (2008). *Security Studies : An Introduction*. New York: Routledge.
- 9/11 Memorial. (2016). *FAQ about 9/11*. Dipetik August 1, 2016, dari National September 11 Memorial & Museum: <http://www.911memorial.org>